

## Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pariwisata Di Kota Padang Pasca Covid-19

Muhammad Furqan Oktowita Putra<sup>1</sup>M. Fachri Adnan<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

<sup>2\*</sup> Universitas Negeri Padang

<b>Article Info</b> <i>Article history:</i> Received : 1 Juni 2022 Publish: 10 Juli 2022	<b>Abstract</b> This research found several problems, namely the Tourism Sector in the City of Padang almost collapsed due to the Covid 19 Pandemic, losses due to the Covid 19 pandemic not only had an impact on the implementation of tourism directly, but also on the tourism supporting industrial sector such as transportation/travel services, hotels, and tourism. so on. The absence of tourist visits, both domestic and foreign, has caused many tours to be closed, the majority of the hotels have also experienced a decline and this means that there is no income for people who work in the tourism sector and budget revenues for the provincial government of West Sumatra. This research was conducted with a descriptive approach, qualitative data survey method, the selection of informants was carried out using a purposive sampling technique, and the validity of the data was tested using a triangulation technique. Data was collected by interview, study documentation and observation. The researcher uses the theory from Mustopadadja (2003) there are five indicators, namely Input, Process, Output, Benefits, Impact. The results show that in the Performance of the Tourism Office in Improving Tourism in the City of Padang Post Covid 19, the policies issued are still weak tourist visits. to tourist attractions, various efforts made by the Tourism Office such as collaborating with other agencies in providing guidance/socialization to tourism and industry actors with assistance to hotels and restaurants affected by the pandemic. However, it is still not enough to help restore the economy of the affected communities.
<b>Keywords:</b> Organizational Performance, Tourism, Policy	
<b>InfoArtikel</b> <i>Article history:</i> Received : 1 Juni 2022 Publish: 10 Juli 2022	<b>Abstrak</b> Penelitian ini karena ditemukan beberapa permasalahan yaitu Sektor Pariwisata di Kota Padang nyaris tuumbang akibat dihantam Pandemi Covid 19 akibat pandemi Covid 19 tidak hanya berdampak kepada penyelenggaraan pariwisata secara langsung, tetapi juga kepada sektor industri penunjang pariwisata seperti jasa transportasi/travel, hotel, dan lain sebagainya. Tidak adanya kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri menyebabkan banyak wisata yang tertutup, mayoritas hotelnya juga mengalami penurunan dan berarti tidak ada pendapatan bagi masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata maupun pemasukan anggaran bagi pemerintah provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif, data kualitatif metode survei, pemilihan informan dilakukan dengan teknik <i>Puposive Sampling</i> , uji keabsahan data menggunakan teknik <i>triagulasi</i> . Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi dan observasi .Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Kinerja Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pariwisata di Kota Padang Pasca Covid 19 adanya kebijakan yang dikeluarkan masih lemahnya kunjungan wisatawan ke tempat wisata, berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata seperti bekerja sama dengan instansi lain dalam memberikan bimbingan/sosialisasi kepada pelaku wisata dan industri dengan bantuan ke hotel sama restoran yang terdampak pandemi. Tetapi masih belum cukup untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak . <i>This is an open access article under the <a href="#">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i>
<b>Corresponding Author:</b> M.Fachri Adnan Universitas Negeri Padang Email: <a href="mailto:fachriadnan@fis.unp.ac.id">fachriadnan@fis.unp.ac.id</a>	

### 1. PENDAHULUAN

Objek wisata di Kota Padang tidak jauh beda dengan objek-objek wisata lainnya di Indonesia yang sangat mengalami kerugian dengan adanya COVID-19 ini, setelah pemerintah memberlakukan PSBB objek wisata di Kota Padang juga langsung menutup objek wisata tersebut di awal maret. Dengan ditutupnya objek wisata tersebut terjadi penurunan drastis pengunjung wisatawan membuat berkurangnya hasil pendapatan dari obyek wisata tersebut,

sepinya wisatawan juga berdampak pada penghasilan warga sekitar yang menjual aksesoris kenang-kenangan ataupun toko serta warung makan. Kondisi sebelum adanya COVID-19 ini memberikan banyak keuntungan bagi warga masyarakat dan juga menaikkan nama dari Kota Padangsendiri yang terkenal dengan berbagai destinasi wisatanya. Segala aktifitas dihentikan namun tetap ada pengelola yang selalu bergantian berjaga setiap harinya di objek wisata tersebut, mengingat perlu adanya perawatan yang harus tetap dilakukan seperti pembersihan kawasan atau sekedar berjaga karena terdapat warung-warung milik warga.

Kota Padang sebagai salah satu daerah yang memiliki kasus infeksi COVID-19 terbanyak di Provinsi Sumatera Barat menerapkan berbagai kebijakan dalam upayanya menanggulangi penyebaran COVID-19 agar tidak meluas dan menginfeksi banyak masyarakat. Salah satu kebijakan yang berdampak langsung kepada sektor pariwisata yaitu adanya surat edaran Walikota Padang tertanggal 22 April sampai 7 Juni 2020 tentang himbauan untuk sementara tidak melaksanakan kegiatan operasional jasa usaha pariwisata dalam upaya kewaspadaan terhadap penularan COVID-19. Dalam surat edaran tersebut tercantum 13 (tiga belas) jasa wisata yang tidak dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya seperti bioskop, panti pijat sampai dengan area permainan anak, bahkan pemberhentian jasa usaha wisata berlaku juga bagi jasa usaha yang berada di lingkungan perhotelan.

Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap berbagai sektor dalam kehidupan manusia. Sektor pariwisata yang selama ini digadang-gadang sebagai sumber kontribusi devisa terbesar kedua bagi Indonesia mengalami penurunan drastis. Sejumlah stimulus disiapkan pemerintah untuk membangkitkan sektor pariwisata tidak mampu membendung dampak negatif COVID-19. Tidak adanya kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri menyebabkan banyak wisata yang ditutup, mayoritas hotel juga mengalami penurunan dan berarti tidak ada pendapatan bagi masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata maupun pemasukan anggaran bagi pemerintah provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Kota Padang Khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan saat ini telah berupaya melakukan pengembangan berupa Fasilitas-Fasilitas untuk para Penguju wisata domestik dan mancanegara. (Reymon dan M.Fachri Adnan 2021:126)

Pemberhentian kegiatan operasional jasa wisata berdampak langsung kepada industri pariwisata di Kota Padang, mengingat Kota Padang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Sumatera Barat. Kondisi tersebut berlanjut ketika Kota Padang ditetapkan sebagai daerah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana segala jenis aktivitas pariwisata secara tegas dilarang sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/259/2020. Terhentinya sektor pariwisata tidak hanya terjadi di jenis wisata belanja dan wisata kuliner yang mana Kota Padang sudah terkenal dengan jenis wisata tersebut, tetapi juga terhadap jenis wisata lainnya seperti wisata sejarah, wisata alam dan wisata budaya. Implikasi dari kondisi tersebut berdampak langsung kepada industri pariwisata yang ada di Kota Padang. Kerugian tidak hanya berdampak kepada penyelenggaraan pariwisata secara langsung, tetapi juga kepada sektor industri penunjang pariwisata seperti jasa transportasi/travel, hotel, dan lain sebagainya. Meskipun banyak pihak memprediksi bahwa COVID-19 bisa berlangsung sepanjang tahun 2020, akan tetapi kerugian bagi industri pariwisata sudah bisa dirasakan dampaknya pasca diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Industri pariwisata dan bisnis penunjangnya menjadi salah satu sektor usaha yang paling terdampak pandemi Covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat kian memperberat beban pelaku usaha di segmen bisnis perjalanan wisata. Pelaku usaha berharap ada peran aktif pemerintah dalam menciptakan demand saat situasi telah memadai. Asita juga meminta adanya kucuran stimulus yang bisa menggerakkan sektor pariwisata.

Stimulus konkret yang bisa diberikan pemerintah misalnya dengan memberikan semacam insentif berupa potongan harga tour, penginapan, akomodasi, dan transportasi yang diformulasikan dengan wisatawan yang sudah divaksin, dan diberlakukan pada destinasi di zonasi hijau. Pemberlakuan [PPKM Darurat](#) memberi dampak luar biasa pada pelaku [pariwisata](#).

Pada intinya dampak luar biasa, [PPKM darurat](#) menghentikan mobilitas sampai menutup destinasi wisata, dengan adanya pppm ini wisatawan masih bisa mengunjungi destinasi wisata dengan syarat taat protokol kesehatan.

**Tabel 1.** Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kota Padang Tahun 2018-2020

Jumlah Wisatawan	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik		
	2018	2019	2020
Mancanegara	71 054	88 351	21 660
Domestik	5 076 581	5 384 236	2 562 966
<b>Jumlah</b>	<b>5 147 635</b>	<b>5 472 587</b>	<b>2 584 626</b>

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang.*

Dilihat data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestic Sebelum adanya COVID-19 pada tahun 2018 sejumlah 5 147 635 mengalami kenaikan pada tahun 2019 dengan jumlah 5 472 587, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan jumlah 2 584 626 tentu dapat dihitung berapa besar kerugian yang ditanggung oleh pihak pengelola dari pendapatan tiket masuknya saja belum lagi ditambah dengan kerugian dari pedagang yang selalu laris dibeli oleh pengunjung.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Kinerja Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pariwisata di Kota Padang Pasca Covid-19**”.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan data kualitatif menggunakan metode survei. Penelitian deskriptif menjelaskan penelitian yang bertujuan mengetahui nilai variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (yang berdiri sendiri) dimana peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Sedangkan metode survei merupakan satu jenis penelitian yang banyak dilakukan oleh peneliti dalam bidang sosiologi, bisnis, politik, pemerintahan dan pendidikan”. Metode survei ini dimaksudkan untuk mengetahui, mengumpulkan pendapat atau informasi dari masyarakat mengenai status gejala pada waktu penelitian dilangsungkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan alat bantu panduan observasi dan wawancara. Panduan tersebut akan di validasi oleh ahli di bidang pariwisata. Lokasi penelitian adalah di Dinas Pariwisata Kota Padang dan Objek Wisata Taplau (Tapi Laut) Kota Padang.

Informan yang menangani langsung kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pariwisata Di Kota Padang Pasca Covid-19.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada rumusan dan rancangan penelitian, peneliti mengangkat judul mengenai “Kinerja Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pariwisata di Kota Padang Pasca Covid 19” yang akan dijabarkan sebagai berikut :

### 3.1. Kinerja Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pariwisata di Kota Padang Pasca Covid 19

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan visi misi suatu organisasi. Kinerja ini dilihat seperti kinerja Dinas Pariwisata Kota Padang dalam Meningkatkan Pariwisata di Kota Padang Pasca Covid 19 yang ditunjang melalui Input, Proses, Output, Hasil, Manfaat dan Dampak dari kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang.

Kinerja dari Dinas Pariwisata Kota Padang dilihat dari Kebijakan yang dikeluarkan dan dilaksanakan apakah berdampak terhadap pariwisata yang ada di Kota Padang. Kinerja ini diharapkan kedepannya mampu meningkatkan dan mengembangkan pariwisata di Kota

Padang agar lebih baik lagi dibawah kebijakan Dinas Pariwisata Kota Padang apalagi di masa Pandemi Covid-19. Adanya Pandemi Covid-19 membuat pelaksanaan kebijakan ini sedikit berkurang dan menyebabkan beberapa kerugian yang terjadi, untuk itu dalam menjalankan kebijakan ini perlu adanya kerja sama dari Pemerintah Daerah dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan Masyarakat berkenan kebijakan yang akan dilaksanakan. Lewat kerjasama ini nantinya diharapkan dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan kebijakan ini. Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan teori dari Indikator Kinerja Organisasi menurut Mustopadjadja (2003:15) menyebutkan ada enam indikator yang mendukung pengukuran kinerja yaitu : Input, Proses, Keluaran atau (Output), Outcome (Hasil), Manfaat serta Dampak yaitu :

a. Input

Kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang pada masa Pandemi Covid 19 masih belum maksimal, masyarakat yang datang ditempat wisata salah satunya wisata Taplau tidak sebanyak sebelum pandemi Covid 19 ini melanda Kota Padang. Masyarakat berharap apapun kebijakan dikeluarkan pemerintah dapat membantu perekonomian masyarakat dan menarik kunjungan wisatawan dimasa pandemi ini. Hal itu senada dengan keterangan yang disampaikan oleh Seksi (Kasi) Kerja Sama dan Kemitraan Dinas Pariwisata Kota Padang yang mengatakan bahwa Seiring berjalan di berbagai penomena dari perubahan dampak pandemi itu sehingga di tahun 2020 otomatis dampak itu berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan di Kota Padang tidak hanya dampak itu yang dirasakan oleh bagian-bagian pariwisata maupun Dinas Pariwisata tetapi juga dampak ini juga dirasakan oleh pelaku-pelaku yang ikut.

Semua dampak itu dilatarbelakangi oleh menurunnya perkembangan pariwisata itu tingkat wisatawan di awal tahun 2021 di bulan Januari itu kurang dari 50% dari target yang ingin kita capai, kalau Mancanegara 5 JT sedangkan kunjungan wisatawan kita kurang dari 20% tidak cukup juga dalam 1 JT. Kegiatan kita dengan berbagai macam event pariwisata juga tidak bisa dilaksanakan karena protokol kesehatan karena terkendala oleh regulasi Satgas Covid pada saat itu dan juga penggiat serta industri kena dampak kena dampak diawal tahun 2021 mengeluarkan sebuah kebijakan belum dijadikan dasar keluarnya Keputusan Kemenpan RI di tahun 2020 di bulan November mula diterapkan peraturan Menteri Pariwisata dalam pemulihan sektor ekonomi dan pariwisata melalui dana hibah untuk pariwisata ini. Berupa dana hibah ke industri khusus Dinas Pariwisata Kota Padang yang mendistribusikan kena dampak Covid-19 contoh Hotel yang mengalami equevensi hotel ini mengalami penurunan 2,85% termasuk dalam kriteria pemberian dana Hibah. Tujuan kita memberikan dampak bagi hotel-hotel yang terkena dampak yang menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dan kepada restoran yang terkena dampak memberikan program CHSE inilah prioritas di Sektor Pariwisata. CHSE ini pelaku usaha mempunyai inovasi dalam kebersihan, kesehatan, aman, ramah lingkungan dalam pariwisata. itu kebijakan dari pada Kemenpar Prov kepada Dinas Pariwisata Untuk membina pelaku pariwisata.

Pada input ini pemerintah Kota Padang mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu dengan memberikan bantuan dana kepada semua tempat wisata yang terkena dampak Covid-19 dan melaksanakan berbagai kegiatan event seperti event musik dan sebagainya guuna meningkatkan minat wisatawan untuk datang berkunjung ke Pariwisata yang ada di Kota Padang. Adapun fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan pariwisata seperti tersedianya tempat sampah dan toilet terdekat dan fasilitas ibadah seperti mesjid di pantai taplau Kota Padang. Hal ini berguna ketika wisatawan datang bisa langsung beribadah.

Terlihat masih tergambar kebijakan yang dilaksanakan belum optimal baik dirasakan oleh masyarakat disekitaran objek wisata akibat pandemi Covid 19 yang memberikan pengaruh kuat terhadap perkembangan wisata kedepannya.

b. Proses

Pada proses ini mengenai Kebijakan yang telah dikeluarkan demi mencapai tujuan untuk Meningkatkan Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19 oleh Dinas Pariwisata, proses jalannya kebijakan oleh Dinas Pariwisata perlu dilihat baik terhadap industri pariwisata maupun pelaku pariwisata dalam menjalankan program pariwisata. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terutama Dinas Pariwisata Kota Padang belum dapat dirasakan oleh masyarakat secara optimal, hal ini karena pedagang masih mengalami penurunan omset selama pandemi Covid-19 karena kurangnya kunjungan wisatawan ke tempat wisata.

c. Output (Keluaran)

Kebijakan yang telah dikeluarkan dan dilaksanakan tentu akan dilihat apakah sesuatu yang telah dikerjakan dapat dipakai. Untuk mengetahui hal ini dari kepuasan dan loyalitas wisatawan yang datang ke pariwisata di Kota Padang pada masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil temuan penelitian, bahwa Dinas Pariwisata belum mampu meningkatkan pariwisata, belum disini karena belum optimal pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat yang terus dilakukan pada Pasca Covid-19. Belum tercapai secara menyeluruh karena terkendala oleh kebijakan-kebijakan penganggaran dan juga keterbatasan regulasi di masa pandemi Covid-19 dan masyarakat belum puas dengan kebijakan Dinas Pariwisata Kota Padang karena pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan belum merata keseluruh masyarakat dan pedagang di pariwisata di Kota Padang.

Di variabel output ini menggambarkan hasil akhir dari kebijakan yang telah ditetapkan, sejauh ini pemerintah Kota Padang melihat pada masa pandemi Covid-19 ini minat wisatawan untuk berkunjung cukup tinggi seperti di tempat wisata Pantai Air Manis dan Pantai Taplau Kota Padang. Walaupun masih terdapat kendala kebijakan tetap diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata Kota Padang.

d. Outcome (Hasil yang terjadi)

Pada outcome ini dilihat hasil dari keluaran ditetapkannya kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang dalam meningkatkan pariwisata di Kota Padang Pasca Covid 19. Berupa kunjungan masyarakat atau wisatawan kembali ke tempat wisata dengan pendekatan Total Quality Management (TQM) yang merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus terhadap lingkungannya. Berdasarkan Hasil temuan penelitian, hasil dari pelaksanaan kebijakan ini baik berupa kegiatan jangka panjang maupun pendek memberikan pengaruh terhadap perkembangan pariwisata dan masyarakat cukup signifikan di tambah kondisi pandemi Covid 19 yang masih melanda sampai sekarang. Dan masyarakat berpendapat bahwa hasil jangka pendek (Outcome) selama pelaksanaan kebijakan belum memberikan efek terutama dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke tempat wisata.

e. Manfaat meningkatkan pariwisata

Kebijakan yang telah dikeluarkan tentu memberikan sebuah manfaat dalam mengembangkan serta meningkatkan pariwisata, manfaat ini berkaitan dengan tujuan dan target akhir dari pelaksanaan kebijakan dalam meningkatkan pariwisata di Kota Padang dan bagaimana hasilnya agar dapat berfungsi secara optimal dan tepat waktu. Berdasarkan temuan akhir dapat dilihat bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan kebijakan ini belum mencapai sebuah target seperti kunjungan wisatawan yang belum tercapai dan dampak pemulihan sektor pariwisata belum di masa pandemi Covid 19 dan belum menyentuh ke seluruh industri dan pelaku usaha pariwisata. Industri seperti restoran, Hotel masih belum optimal. Tetapi ada sebagian yang sudah mencapai target karena memanfaatkan zaman digitalisasi dan bisa secara online dan pendapat masyarakat mengatakan bahwa Target untuk mencapai suatu kebijakan seperti wisata Taplau yang belum menyentuh pelaku pariwisata dan industri yang ada sehingga belum mencapai

tujuan yang diharapkan. Adanya digitalisasi belum membantu sepenuhnya masyarakat yang ada disekitaran wisata.

f. Dampak (Impact)

Dampak disini berkaitan dengan apa hasil dari kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dalam meningkatkan pariwisata pasca Covid-19. Disini pelaksanaan kebijakan dirasakan selain oleh pelaku pariwisata juga masyarakat yang berkunjung ke wisata yang ada di kota Padang baik dalam maupun luar daerah. Dampak ini sudah diketahui selama pasca Covid-19 ini terjadi. Berdasarkan temuan akhir dapat digambarkan bahwa dampak dari adanya program dan kegiatan dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti event dan beekoordinasi dengan satgas covid-19 dan Dinas Kesehatan dan semua pihak terkait terhadap event dan aman terhadap wisatawan yang datang. Kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang membatasi jumlah kunjungan hanya 50% pada pelaksanaan event tersebut dan mengenai dampak ini juga dirasakan oleh pemerintahan yang berdampak terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang merosok akibat lemahnya kunjungan wisatawan ke tempat wisata, juga berpengaruh terhadap ekonomi turun yang dirasakan oleh masyarakat disekitar objek wisata. Kebijakan ini sebenarnya membantu tetapi masih terdapat hambatan akibat pandemi Covid-19 yang dirasakan selama menjalankan kebijakan. Masyarakat berpendapat juga bahwa adanya pandemi covid 19 ini berpengaruh terhadap pendapat saya sehari-hari terutama jualan es kelapa sekarang, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan juga belum dirasakan saat sekarang dampaknya masih seperti itu saja.

### **3.2. Implementasi Hasil Kinerja Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pariwisata di Kota Padang**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis melihat bahwa kinerja pada dasarnya dilakukan demi mencapai suatu hasil yang terbaik dalam segala proses yang dilakukan secara bersama-sama dan memiliki suatu wewenang beserta tanggung jawab. Apapun tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi akan diusahakan hingga mencapai suatu hasil yang optimal beserta maksimal.

Kinerja Dinas Pariwisata Kota Padang dalam meningkatkan pariwisata dimasa Pandemi Covid 19 dilaksanakan dengan mengeluarkan sebuah kebijakan yang dibantu oleh Sektor Pemerintahan lainnya. Fokus Dinas Pariwisata disini bagaimana kebijakan yang dikeluarkan mampu mengembangkan serta meningkatkan pariwisata yang ada di Kota Padang agar lebih baik lagi walau dimasa pandemi Covid 19. Pandemi Covid 19 di Kota Padang sudah terjadi hampir 3 tahun lamanya, tentu menjadi suatu permasalahan karena adanya pandemi ini menyebabkan beberapa kerugian yang dirasakan baik oleh Pemerintah maupun Masyarakat. Selain Dinas Pariwisata melakukan kerja sama berkenaan kebijakan ini, tentu dengan harapan mampu memberikan suatu nilai hasil guna menciptakan ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung di tempat wisata Untuk itu Kinerja Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pariwisata di Kota Padang Pasca Covid 19 dilihat dari indikator kinerja organisasi menurut Mustopadjadja (2003:15) yang indikator kinerja ini terdiri dari Lima indikator yaitu : Input, Proses, Output (Keluaran), Manfaat meningkatkan pariwisata, Dampak (Impact).

a. Input

Input disini dalam Kinerja Dinas Pariwisata Kota Padang pada masa Pandemi Covid 19, Dinas Pariwisata Kota Padang telah mengeluarkan suatu kebijakan untuk meningkatkan pariwisata di Kota Padang Pada masa Pandemi Covid 19 dengan dikeluarkannya suatu Dasar Hukum yang dibuat dari tahun 2020 sampai 2021 ketika pandemi Covid 19 melanda, terhadap pengembangan pariwisata berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan yang berubah drastis hingga saat sekarang.

Menurunya perkembangan pariwisata juga ikut dalam latar belakang dibuatnya kebijakan ini, hanya sekitar 50% dari target yang ingin dicapai oleh pemerintah

terhadap kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri (Macanegara). Pemerintah telah berupaya dengan membuat suatu program dan kegiatan seperti event-event pariwisata yang sesuai dengan protokoler kesehatan dan bekerja sama dengan Satgas Covid-19, Keputusan Kemenpan RI tahun 2020 tepatnya bulan November diteerapkan Peraturan Menteri Pariwisata dalam pemulihan sektor ekonomi dan pariwisata Berupa Dana Hibah yang diberikan ke Hotel dan Restoran yang terkena dampak sesuai dengan program CHSE. Program ini sesuai dengan kebijakan dari Kemenpar Prov kepada Dinas Pariwisata untuk membina pelaku pariwisata. Adapun upaya yang dilakukan Kota Padang dalam mencapai target dengan kegiatan MICE. Adanya MICE mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan pariwisata di masa pandemi Covid-19. Mengenai fasilitas disini pada masa Pandemi Covid 19 berupa dana Hibah dalam memberikan pelayanan prima dan memperbaiki sarana dan prasarana sesuai dengan protokol kesehatan seperti Mesin Jahit bagi pelaku pariwisata dan pemasaran memberikan pelatihan protokol Pariwisata.

Namun kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang di masa pandemi Covid 19 belum maksimal, dilihat masyarakat yang datang masih berkurang dari jumlah yang diharapkan salah satunya wisata Taplau (Tapi Laut) tempat mencari nafkah bagi masyarakat.

b. Proses

Mengenai proses terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan untuk meningkatkan pariwisata di masa pandemi Covid 19 perlu dilihat lebih baik lagi terhadap pelaku yang terlibat dalam program pariwisata. Dalam pelaksanaannya kebijakan Dinas Pariwisata terhadap event yang telah ada, mengadakan event ini sebagai suatu strategi untuk memancing kedatangan wisatawan ke Kota Padang.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata menjalin suatu kerja sama melalui program Paru (Padang-Pekanbaru) sebagai salah satu kerja sama aspek Universitas yang membantu mengkaji aspek kelayakan dan koordinasi dalam membahas rencana kerja seperti dalam bentuk pameran dan kunjungan kerja bersama.

Masyarakat pun berpendapat bahwa Dinas Pariwisata Kota Padang belum optimal dirasakan terutama pedagang yang mengalami penurunan pendapatan di masa pandemi Covid 19 melanda. Kebijakan yang dilaksanakan belum stabil dan belum berdampak kepada masyarakat secara meluas terutama yang mencari uang untuk bertahan hidup.

c. Output (Keluaran)

Keluaran disini mengenai hasil dari kebijakan yang telah dilaksanakan dengan melihat kepuasan wisatawan yang datang ke Kota Padang di Masa Pandemi Covid 19. Masyarakat dapat dikatakan puas dari pantauan Dinas Pariwisata tetapi kunjungan wisatawan masih menurun tetapi masih menaati Prokes yang ada ketika berkunjung ke tempat wisata. Tetapi masih belum optimal, pembinaan yang sudah dilakukan dilapangan di Pasca Covid 19 sudah mencapai tetapi belum mencapai seluruhnya. Karena terkendala dari kebijakan berupa penganggaran dan keterbatasan regulasi di masa pandemi. Yang dilakukan Dinas Pariwisata dengan pembinaan belum merata ke masyarakat padahal sudah terlaksana terutama pedagang pariwisata Kota Padang. Pembinaan itu jika tanpa praktek langsung dan peninjauan tidak akan terlaksana. Masyarakat belum merasakan puas sepenuhnya kebijakan pariwisata di Kota Padang.

d. Outcome (Hasil yang terjadi)

Adanya Outcome pada dasarnya penting untuk melihat hasil berupa jangka pendek dan panjang terhadap penerapan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah terkhususnya Dinas Pariwisata Kota Padang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan pasca Covid 19. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa belum memberikan sebuah efek jelas terhadap perkembangan wisatawan dan masyarakat mengenai kebijakan berupa pelaksanaan event dan kegiatan dalam meningkatkan pariwisata di Kota Padang.

Kunjungan wisatawan masih minim dari biasanya, harapannya agar Pemerintah lebih meningkatkan lagi pelaksanaan kebijakan dengan melihat kondisi masyarakat di tempat wisata.

e. Manfaat meningkatkan pariwisata

Manfaat dalam mencapai suatu tujuan akhir dari meningkatkan pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kota Padang, dilihat hasilnya berkaitan tujuan akhir dan hasilnya nanti bisa dinikmati oleh masyarakat secara optimal. Target kebijakan berkaitan dengan kunjungan wisatawan yang belum tercapai karena berdampak pemulihan sektor pariwisata belum maksimal dan menyentuhkan seluruh pelaku industri pariwisata Kota Padang. Hotel dan restoran masih rendah baik dari Homestay nya dikarenakan pandemi Covid 19 semuanya bisa memanfaatkan secara online melalui digitalisasi pemasaran. Promosi ini melalui media-media yang ada berupa makanan, jual barang berkaitan dengan MICE dari pemerintah.

Kebijakan ini belum mencapai target salah satunya wisata Taplau (Tapi Lauik) dilihat pelaku industri dan hotel sekitaran taplau belum mencapai tujuan. Digitalisasi belum sepenuhnya membantu masyarakat disekitaran wisata di Kota Padang.

f. Dampak (Impact)

Dampak ini dilihat dari kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang dalam meningkatkan Pariwisata Di kota Padang pasca Covid 19 apakah sudah dirasakan oleh masyarakat ketika berkuunjung ke tempat wisata di Kota Padang baik masyarakat yang tidak di Kota Padang saja. Dampak ini dilihat selama masa pandemi Covid 19 ini. Program dan kegiatan saat ini sudah melalui penyelenggaraan event yang sesuai dengan protokol kesehatan dan bekoordinas dengan Satgas Covid 19, Dinaas Kesehatan agar event ini bisa lebih nyaman dengan upaya meningkatkan target wisatawan yang datang, promosi melalui media sosial dan membatasi kunjungan yang datang. Dampak akibat lemahnya kunjungan wisatawan ini ke tempat wisata beerpengaruh terhadap PAD dan ekonomi masyarakat setempat. Kebijakan ini adapun sebenarnya membantuu tetapi masih menjadi Hambatan akibat pandemi Covid 19 dalam menjalankan kebijakan.

Masyarakat juuga menyampaikan bahwa program yang dilaksanakan memberikan dampak kepada masyarakat yaitu : pendapatan masyarakat dan melemahnya kuunjungan wisatawan ke tempat wisata pada saat Covid 19 disekitar objek wisata.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pariwisata di Kota Padang Pasca Covid 19 masih belum optimal dan maksimal. Hal ini karena kebijakan yang dilaksanakan seperti sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat belum menyeluruh dan kunjungan wisatawan masih menurun ke pariwisata yang ada di kota Padang seperti Taplau (Tapi Lauik). Kinerja ini dilihat dari 5 Indikator yaitu Input, Proses, Proses (Keluaran), Manfaat Meningkatkan Pariwisata, Dampak (Impact).
- 2) Kebijakan dari Kinerja Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pariwisata di Masa Pandemi Covid 19 dengan adanya program dan kegiatan seperti event dan kerja sama antara Padang dan Pekanbaru sesuai kebijakan Kemenpan Ri dan Kemenpan Prov terhadap Pariwisata, dimasa Pandemi masih menjadi suatu hambatan yang dirasakan oleh Pemerintah dan masyarakat tentunya.

#### 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji dan syukur penelitian ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Selama penulisan skripsi ini pertama penulis ucapkan terimakasih kepada diri sendiri karena telah mampu berjuang menyelesaikan



skripsi ini selain itu penulis berterimakasih tentunya kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu dengan ketulusan hati penulis ucapkan terimakasih atas semua bimbingan, dukungan, motivasi, dan doa semoga kebaikan tersebut menjadi amal jariyah dan diberikan imbalan yang setimpal dari Allah Amin.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Baginda Syah. 2016. *Strategi Pengembangan Fasilitas Guna Meningkatkan Daya Tarik Minat Wisatawan Di Darajat Pass (Waterpark) Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Andriani, Dewi. 2020. *Pariwisata Terpukul, Ini Langkah Mitigasinya*. <https://m.bisnis.com/amp/read/20200411/12/1225498/pariwisata-terpukul-ini-langkah-mitigasinya>, 11 April 2020.
- Anisa, Dina Fitri. 2020. *Tiga Langkah Kemenparekraf Hadapi Krisis Pandemi Covid-19*. <https://www.beritasatu.com/nasiona/1/617503-tiga-langkah-kemenparekraf-hadapi-krisis-pandemi-covid19>, diakses 6 April 2020.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta.
- Arismayanti, Ni Ketut. 2006. *“Strategi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Ecowisata Jatiluwih di Kabupaten Tabanan Bali” (tesis)*. Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Baban, Sobandi dkk. 2006. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung.
- Desak Ayu Putu Suciati & Made I Suadnya. 2021. *Strategi Pemulihan Pariwisata Pasca Penanganan Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali*. Dinas Pol PP Pemerintah Provinsi Bali.
- Dunn, William, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Fajri, Khoirul Dan Nova Riyanto. 2016. *“Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Bandung Dalam Meningkatkan Tingkat Kunjungan Wisatawan Asal Malaysia.”* *Tourism Scientific Journal* 1(2):167–83.
- Fandefi, Khalid. 1995. *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty.
- Gede Paramita, Ida Bagus. 2020. *New Normal Bagi Pariwisata Bali Di Masa Pandemi Covid*. <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/PB/article/view/1723> diakses tanggal 24 Mei 2021.
- Maulida Syafitri, M. Fachri Adnan. 2021. *Strategi Pengembangan Objek Wisata Rimbo Panti Oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Pasaman*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol 5 No 4
- Reymon Suuri Putra, M. Fachri Adnan. 2021. *Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Pengembangan Pantai Muaro Lasak sebagai Ikon Pariwisata*. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* . Vol 3 No 2
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/382/2020 dan World Healthy Organization (WHO).
- Mahmudi. 2013. *“Manajemen Kinerja Sektor Publik”*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *“Pengukuran Kinerja Sektor Publik”*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Pitana, I Gde & Surya Diarta, I Ketut. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Prawirosentono, Suryadi. 2008. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta:BPFE.

- Prawirosentono, Suryadi. 2012. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta:BPFE.
- Solemede, Ivana et al. 2020. “Strategi Pemulihan Potensi Pariwisata Budaya Di Provinsi Maluku ( Suatu Kajian Analisis Di Masa Transisi Kenormalan Baru ).” *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan* I(1): 69–86.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Reseach and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Suwantoro, Gamal. (2001). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Wahab, Salah (2003). *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wilopo, K.H dan Luchman, H. 2017. “Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya (Studi Kasus Pada Kawasan Situs Trowulan Sebagai Pariwisata Budaya Unggulan Di Kabupaten Mojokerto).” *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya* 42 (1): 56–65.
- Yoeti, Oka A, 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Yoeti, Oka A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Penerbit Angkasa Bandung.
- Yoeti, Oka A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta.